

IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA: TANTANGAN, STRATEGI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PRAKTIK PEMBELAJARAN

Endah Yunita¹, Yantoro², Hadiyanto³, Eka Sastrawati⁴

^{1,2,3,4}Magister Pendidikan Dasar Pascasarjana Universitas Jambi

Alamat e-mail : ¹yunitaendah349@gmail.com, ²yantoro@unja.ac.id,
³hadiyanto@unja.ac.id, ⁴ekasastrawati@unja.ac.id

ABSTRACT

This literature review examines the implementation of the Kurikulum Merdeka in Indonesia, exploring its challenges, strategies for implementation, and its impacts on classroom learning practices. Drawing on policy documents, practitioner guides and empirical research, the study identifies major obstacles such as human-resource readiness, infrastructural support and change of paradigm. It reviews strategic responses including staged implementation, professional development for teachers, school-based adaptation and stakeholder collaboration. The review finds that the curriculum yields positive effects on student engagement, differentiated learning, and teacher innovation, though variances in implementation quality remain. The paper concludes with suggestions for strengthening the system through continuous monitoring, community of practice, and responsive support.

Keywords: *Independent Curriculum, Learning Practices, Challenges, Strategies, Impacts.*

ABSTRAK

Kajian pustaka ini mengulas pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Indonesia dengan fokus pada tantangan yang dihadapi, strategi implementasi yang diterapkan, serta dampaknya terhadap praktik pembelajaran di dalam kelas. Berdasarkan dokumen kebijakan, panduan praktis dan penelitian empiris, ditemukan bahwa hambatan utama mencakup kesiapan sumber daya manusia, dukungan sarana-prasarana serta perubahan paradigma pembelajaran. Strategi yang dibahas meliputi implementasi bertahap, pengembangan profesional guru, adaptasi sekolah dan kolaborasi pemangku kepentingan. Kajian ini menunjukkan bahwa kurikulum memberikan efek positif seperti peningkatan keterlibatan siswa, pembelajaran terdiferensiasi dan inovasi guru, meskipun terdapat variasi pada tingkat keberhasilan implementasi. Kesimpulannya, sistem perlu diperkuat melalui monitoring berkelanjutan, komunitas belajar dan dukungan responsif.

Kata Kunci: Kurikulum Merdeka, pembelajaran, tantangan, strategi, dampak

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan bangsa dan menjadi faktor kunci dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing di era global. Dalam konteks abad ke-21 yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi yang sangat cepat, sistem pendidikan dituntut untuk adaptif, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan zaman (Trilling & Fadel, 2009). Pendidikan tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi atau yang dikenal sebagai 4C skills (Partnership for 21st Century Learning, 2019).

Sejalan dengan tantangan global tersebut, sistem pendidikan di Indonesia terus melakukan pembaruan melalui kebijakan kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu instrumen strategis dalam mencapai tujuan pendidikan nasional karena di dalamnya tercermin arah, tujuan, dan strategi pembelajaran yang harus diwujudkan di setiap satuan pendidikan (Rusman, 2018). Sejak masa kemerdekaan, Indonesia telah mengalami beberapa kali

perubahan kurikulum, mulai dari Kurikulum 1947 hingga Kurikulum 2013, yang masing-masing disesuaikan dengan dinamika sosial, politik, dan kebutuhan pembangunan nasional.

Kurikulum 2013, misalnya, dirancang untuk memperkuat karakter dan kompetensi peserta didik melalui pendekatan saintifik. Namun, dalam pelaksanaannya banyak ditemukan kendala, terutama terkait beban administrasi guru, keterbatasan pelatihan, dan kesenjangan antar-sekolah (Yulaelawati, 2020). Kondisi ini mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi kurikulum yang lebih fleksibel dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik serta konteks lokal.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan Kurikulum Merdeka pada tahun 2022 sebagai bagian dari program Merdeka Belajar (Kemendikbudristek, 2022). Kurikulum ini menekankan pada prinsip fleksibilitas, otonomi sekolah, dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (student-centered

learning). Tujuan utama Kurikulum Merdeka adalah untuk menciptakan proses pembelajaran yang relevan dengan minat, bakat, serta potensi siswa melalui pembelajaran berbasis proyek dan profil Pelajar Pancasila sebagai kerangka nilai dan karakter (Kemendikbudristek, 2022; Swarapendidikan, 2025).

Dalam praktiknya, Kurikulum Merdeka memberikan ruang bagi sekolah dan guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi dan kebutuhan siswa. Guru memiliki keleluasaan untuk mengembangkan perangkat ajar, menentukan strategi pembelajaran, serta mengevaluasi capaian belajar siswa secara kontekstual (Fatimah & Utami, 2024). Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus mengatasi kesenjangan mutu pendidikan antar-daerah.

Namun, pelaksanaan Kurikulum Merdeka tidak terlepas dari berbagai tantangan di lapangan. Sejumlah penelitian dan laporan kebijakan menunjukkan bahwa kesiapan guru, sarana-prasarana, serta pemahaman terhadap filosofi kurikulum baru masih menjadi persoalan utama (Nurul Arifa, 2022; PSKP Kemendikdasmen,

2022). Selain itu, keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh dukungan kepala sekolah, pemerintah daerah, dan komunitas pendidikan yang mampu menciptakan ekosistem belajar yang kolaboratif dan berkelanjutan (Suryani, 2023).

Melihat konteks tersebut, penting untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana implementasi Kurikulum Merdeka berjalan di lapangan, tantangan apa saja yang dihadapi, strategi apa yang digunakan oleh berbagai pihak, serta dampak yang mulai terlihat terhadap praktik pembelajaran di sekolah. Kajian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka untuk menghimpun temuan-temuan ilmiah, kebijakan resmi, dan pengalaman empiris dari berbagai sumber. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai arah pelaksanaan Kurikulum Merdeka dan rekomendasi strategis bagi peningkatan mutu pendidikan nasional.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (literature review), yang bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan

mensintesis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik implementasi Kurikulum Merdeka. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang berorientasi pada penelusuran konseptual, teoritis, dan empiris terhadap kebijakan dan praktik Kurikulum Merdeka tanpa melakukan pengumpulan data primer di lapangan.

Menurut Zed (2014), kajian pustaka merupakan suatu metode penelitian yang memanfaatkan sumber-sumber kepustakaan seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan sebagai bahan utama untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pendekatan ini berfungsi untuk mengidentifikasi teori, konsep, hasil penelitian sebelumnya, serta kesenjangan pengetahuan (research gap) yang berkaitan dengan topik yang dikaji.

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif deskriptif, karena bertujuan memberikan gambaran yang komprehensif tentang fenomena implementasi Kurikulum Merdeka melalui interpretasi terhadap data literatur yang tersedia. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan fakta, konsep, dan

hubungan antarvariabel tanpa melakukan manipulasi terhadap objek kajian (Sugiyono, 2018).

Dalam konteks ini, peneliti berperan sebagai instrument utama yang melakukan analisis terhadap berbagai data sekunder. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis, tetapi untuk menyusun pemahaman teoritis dan konseptual tentang tantangan, strategi, dan dampak dari penerapan Kurikulum Merdeka.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka

Hasil kajian terhadap berbagai literatur menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka menghadapi sejumlah tantangan struktural, teknis, dan kultural di berbagai jenjang pendidikan. Tantangan-tantangan tersebut secara umum dapat dikelompokkan menjadi empat aspek utama:

a. Kesiapan Guru dan Sumber Daya Manusia, Kesiapan guru menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Menurut laporan PSKP Kemendikdasmen (2022), sebagian besar guru masih

berada pada tahap adaptasi terhadap paradigma baru pembelajaran yang lebih fleksibel dan berpusat pada siswa. Perubahan peran guru dari transmitter of knowledge menjadi learning facilitator menuntut kemampuan pedagogik, digital, dan desain pembelajaran yang lebih kompleks (Fatimah & Utami, 2024). Penelitian Nurul Arifa (2022) menemukan bahwa 48% kepala sekolah dan 52% guru belum memahami secara menyeluruh filosofi dan mekanisme Kurikulum Merdeka, khususnya terkait diferensiasi pembelajaran dan asesmen formatif. Hal ini diperburuk oleh masih minimnya pelatihan intensif dan pendampingan berkelanjutan di beberapa daerah, terutama di luar Pulau Jawa.

- b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana, Faktor kedua yang menonjol adalah keterbatasan sarana-prasarana pendukung pembelajaran. Implementasi pembelajaran berbasis proyek (Project Based Learning) dan pembelajaran berdiferensiasi memerlukan fasilitas yang memadai, baik berupa ruang

belajar yang fleksibel, alat peraga, maupun akses terhadap teknologi digital (Kemendikbudristek, 2022). Namun, laporan Pusat Kurikulum dan Pembelajaran (2023) menunjukkan adanya ketimpangan antar wilayah dalam hal ketersediaan perangkat digital dan jaringan internet. Sekolah-sekolah di daerah terpencil mengalami kesulitan dalam mengakses platform Merdeka Mengajar dan sumber belajar digital, sehingga implementasi Kurikulum Merdeka tidak berjalan optimal (Suryani, 2023).

- c. Paradigma dan Budaya Pembelajaran Kurikulum Merdeka menuntut perubahan paradigma yang cukup besar dalam budaya pembelajaran di Indonesia. Jika sebelumnya pembelajaran cenderung berorientasi pada hasil ujian dan capaian kognitif, kini orientasinya bergeser pada learning process dan pengembangan karakter sesuai Profil Pelajar Pancasila (Kemendikbudristek, 2022). Perubahan ini tidak selalu mudah diterapkan karena sebagian guru masih terbiasa dengan pendekatan tradisional. Menurut Rusman

(2018), perubahan paradigma pendidikan memerlukan waktu, kesadaran, dan lingkungan yang mendukung inovasi. Resistensi muncul ketika guru merasa tidak siap atau takut gagal dalam menerapkan strategi pembelajaran baru, seperti pembelajaran berbasis proyek atau asesmen diagnostik.

- d. Manajemen dan Kebijakan Sekolah, Tantangan lainnya terkait dengan kapasitas manajerial sekolah dalam mengelola perubahan. Beberapa sekolah masih mengalami kesulitan dalam merencanakan kurikulum operasional satuan pendidikan (KOSP), menyusun perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa, dan melakukan asesmen berbasis capaian pembelajaran (PSKP Kemendikdasmen, 2022). Kepala sekolah memiliki peran strategis dalam memimpin transformasi kurikulum. Namun, penelitian Suryani (2023) menunjukkan bahwa tidak semua kepala sekolah memahami pendekatan *school-based management* yang menjadi fondasi utama implementasi Kurikulum Merdeka. Akibatnya, perencanaan

kurikulum di banyak sekolah belum sepenuhnya menggambarkan prinsip otonomi dan fleksibilitas yang diamanatkan oleh kebijakan.

2. Strategi Implementasi Kurikulum Merdeka

Dari hasil sintesis literatur, berbagai strategi telah diterapkan oleh pemerintah dan satuan pendidikan untuk mengatasi tantangan-tantangan di atas. Strategi-strategi tersebut bersifat adaptif dan kolaboratif, mencakup level makro (pemerintah), meso (sekolah), dan mikro (guru).

- a. Pendampingan dan Pelatihan Berkelanjutan, Kementerian Pendidikan melalui program Guru Penggerak dan Sekolah Penggerak menyediakan pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) yang fokus pada peningkatan kompetensi pedagogik dan penguasaan kurikulum (Kemendikbudristek, 2022). Program ini memberikan contoh praktik baik, mentoring sejawat, serta modul-modul ajar yang dapat diadaptasi secara fleksibel oleh sekolah. Pelatihan berbasis *coaching* dan *peer learning* terbukti efektif dalam meningkatkan motivasi dan kesiapan guru untuk berinovasi (Fatimah & Utami,

2024). Di beberapa daerah, pelatihan dilakukan secara daring menggunakan platform Merdeka Mengajar, yang mempermudah akses dan mempercepat proses pembelajaran profesional guru.

b. **Fleksibilitas Tahapan Implementasi,** Kemendikbudristek mengembangkan tahapan implementasi yang berjenjang, yaitu mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi (PSKP Kemendikdasmen, 2022). Strategi ini memungkinkan setiap sekolah menyesuaikan diri berdasarkan tingkat kesiapan sumber daya manusia dan fasilitas yang dimiliki. Pendekatan bertahap ini membantu sekolah menghindari tekanan administratif dan memberi waktu untuk beradaptasi dengan sistem baru. Penelitian Yunandra (2023) menunjukkan bahwa pendekatan ini berkontribusi positif terhadap peningkatan kepercayaan diri guru dalam mengembangkan kurikulum operasional sekolah.

c. **Kolaborasi dan Komunitas Belajar,** Strategi lain yang terbukti penting adalah pembentukan komunitas belajar antar-guru, seperti Komunitas Belajar Merdeka (KOMER) yang difasilitasi oleh

Kemendikbudristek. Komunitas ini berfungsi sebagai ruang berbagi praktik baik, refleksi pembelajaran, dan dukungan sosial profesional antar guru (Suryani, 2023). Kolaborasi lintas sekolah dan jejaring guru mempercepat difusi inovasi pembelajaran serta mengatasi kesenjangan pemahaman antar wilayah. Hal ini sejalan dengan pandangan Wenger (1998) tentang *community of practice*, di mana pembelajaran kolektif menjadi kunci transformasi profesionalisme guru.

d. **Pemanfaatan Teknologi dan Sumber Daya Digital,** Pemanfaatan teknologi informasi menjadi elemen kunci dalam memperluas akses terhadap sumber belajar dan memperkuat inovasi pembelajaran. Platform Merdeka Mengajar, Rapor Pendidikan, dan Platform Kurikulum Merdeka menyediakan berbagai modul ajar, video pembelajaran, serta asesmen digital yang dapat digunakan guru di seluruh Indonesia (Kemendikbudristek, 2023). Selain itu, adaptasi teknologi juga mendukung pelaksanaan asesmen formatif dan diagnostik, yang menjadi ciri utama Kurikulum

Merdeka. Guru dapat menggunakan aplikasi seperti Learning Management System (LMS) untuk mengidentifikasi perkembangan capaian belajar siswa secara lebih cepat dan akurat (Fatimah & Utami, 2024).

3. Dampak Implementasi terhadap Praktik Pembelajaran

Berdasarkan hasil kajian literatur, penerapan Kurikulum Merdeka membawa beberapa dampak positif terhadap praktik pembelajaran di sekolah, meskipun tingkat keberhasilannya masih bervariasi.

a. Peningkatan Keterlibatan dan Motivasi Belajar Siswa, Beberapa penelitian menemukan bahwa Kurikulum Merdeka meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam proses belajar. Fatimah dan Utami (2024) melaporkan bahwa penerapan pembelajaran berbasis proyek di sekolah dasar meningkatkan rasa ingin tahu, kolaborasi, dan tanggung jawab siswa terhadap hasil kerja mereka. Hal ini disebabkan oleh perubahan paradigma pembelajaran yang berpusat pada siswa dan pendekatan tematik kontekstual yang relevan dengan kehidupan nyata.

b. Fleksibilitas Guru dalam Mendesain Pembelajaran, Guru memiliki keleluasaan yang lebih besar dalam mengembangkan perangkat ajar sesuai kebutuhan dan karakteristik siswa. Dengan prinsip diferensiasi pembelajaran, guru dapat mengakomodasi perbedaan gaya belajar dan kecepatan belajar siswa (Kemendikbudristek, 2022). Hal ini berdampak pada meningkatnya kreativitas guru dalam memilih metode pembelajaran dan asesmen yang lebih bermakna. Namun, fleksibilitas ini juga menuntut tanggung jawab profesional dan refleksi berkelanjutan agar pembelajaran tetap terarah dan berkualitas (Rusman, 2018).

c. Peningkatan Inovasi dan Kolaborasi Sekolah, Implementasi Kurikulum Merdeka mendorong munculnya berbagai inovasi sekolah, seperti Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang memadukan pembelajaran akademik dengan nilai-nilai karakter dan budaya lokal (Kemendikbudristek, 2023). Selain itu, kolaborasi antar-sekolah dalam berbagi praktik baik juga menjadi

dampak positif yang memperkuat ekosistem pendidikan berbasis komunitas. Sekolah yang tergabung dalam Sekolah Penggerak berperan sebagai model dan mentor bagi sekolah lain di sekitarnya (Suryani, 2023).

- d. Kesenjangan Implementasi antar Wilayah, Walaupun terdapat berbagai kemajuan, masih ditemukan kesenjangan hasil implementasi antar daerah. Sekolah-sekolah di wilayah perkotaan cenderung lebih siap dibandingkan sekolah di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Hal ini menunjukkan perlunya kebijakan afirmatif dan pendampingan khusus agar pemerataan kualitas pendidikan dapat tercapai (PSKP Kemendikdasmen, 2022).

4. Sintesis dan Implikasi

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka sangat bergantung pada kesiapan ekosistem pendidikan yang melibatkan guru, kepala sekolah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pendekatan bottom-up melalui pemberdayaan guru dan komunitas belajar terbukti lebih efektif dibanding

pendekatan top-down yang bersifat administrative.

Dengan demikian, Kurikulum Merdeka bukan sekadar reformasi struktural, tetapi transformasi kultural yang membutuhkan komitmen jangka panjang, refleksi kolektif, dan dukungan lintas sektor agar tujuan pendidikan nasional dapat terwujud secara berkelanjutan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian pustaka terhadap berbagai sumber ilmiah, kebijakan pendidikan, dan laporan implementasi di lapangan, dapat disimpulkan bahwa Kurikulum Merdeka merupakan terobosan strategis dalam reformasi pendidikan Indonesia yang bertujuan menciptakan pembelajaran yang lebih fleksibel, kontekstual, dan berpusat pada peserta didik. Kurikulum ini berlandaskan pada filosofi Merdeka Belajar, yaitu memberikan kebebasan bagi guru dan siswa untuk berkreasi, berpikir kritis, serta mengembangkan potensi sesuai minat dan bakat masing-masing.

Secara umum, Kurikulum Merdeka hadir untuk menjawab tantangan pendidikan abad ke-21 dengan mengedepankan Profil Pelajar

Pancasila sebagai orientasi utama pengembangan karakter dan kompetensi. Pembelajaran diarahkan agar peserta didik tidak hanya menguasai pengetahuan, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir reflektif, kolaboratif, kreatif, serta berkarakter sesuai nilai-nilai Pancasila.

Namun demikian, implementasi Kurikulum Merdeka di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Hambatan utama terletak pada kesiapan sumber daya manusia, terutama guru dan kepala sekolah, yang belum sepenuhnya memahami filosofi dan mekanisme kurikulum baru. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana, ketimpangan akses teknologi antarwilayah, serta resistensi terhadap perubahan paradigma pembelajaran turut menjadi kendala yang signifikan (Nurul Arifa, 2022; PSKP Kemendikdasmen, 2022).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah dan lembaga pendidikan telah menerapkan beragam strategi, seperti pelatihan dan pendampingan berkelanjutan bagi guru melalui program Guru Penggerak dan Sekolah Penggerak, penguatan komunitas belajar guru, serta penerapan tahapan implementasi

yang fleksibel — mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi (Kemendikbudristek, 2022; Yunandra, 2023). Strategi ini terbukti membantu sekolah beradaptasi secara bertahap sesuai tingkat kesiapan dan sumber daya yang dimiliki.

Secara empiris, implementasi Kurikulum Merdeka telah memberikan dampak positif terhadap praktik pembelajaran. Guru memiliki ruang yang lebih luas untuk berinovasi, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, dan mengembangkan asesmen formatif yang berorientasi pada proses belajar siswa. Di sisi lain, siswa menjadi lebih aktif, kreatif, dan termotivasi karena pembelajaran berbasis proyek yang relevan dengan konteks kehidupan mereka (Fatimah & Utami, 2024). Selain itu, kolaborasi antar sekolah dan komunitas belajar guru turut memperkuat ekosistem pendidikan yang lebih adaptif dan kolaboratif.

Meskipun demikian, hasil kajian juga menunjukkan bahwa pemerataan mutu implementasi masih menjadi tantangan besar. Sekolah-sekolah di daerah perkotaan cenderung lebih siap dibandingkan sekolah di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan

afirmatif dan dukungan berkelanjutan agar transformasi pendidikan dapat berjalan merata dan inklusif di seluruh wilayah Indonesia.

Secara keseluruhan, Kurikulum Merdeka bukan sekadar reformasi kurikulum, tetapi merupakan transformasi paradigma pendidikan menuju sistem yang lebih humanis, reflektif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Keberhasilan implementasinya menuntut kolaborasi erat antara pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat luas. Dengan komitmen bersama, Kurikulum Merdeka berpotensi menjadi fondasi kuat bagi terwujudnya pendidikan yang benar-benar memerdekakan peserta didik sesuai cita-cita Ki Hajar Dewantara bahwa “pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat.”

DAFTAR PUSTAKA

- Arifa, N. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka dan Tantangannya. Info Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, XIV(9-I), 1–8.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatimah, N., & Utami, R. D. (2024). Implementasi Kurikulum Merdeka pada Pelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Dasar. *ELSE (Elementary School Education Journal)*, 8(3), 150–161.
- Kemendikbudristek. (2022). *Implementasi Kurikulum Merdeka pada Tahun Pertama (Perubahan Awal dan Tantangan yang Dihadapi)*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Kemendikbudristek. (2023). *Panduan Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Partnership for 21st Century Learning. (2019). *Framework for 21st Century Learning*.
- PSKP Kemendikdasmen. (2022). *Laporan Implementasi Kurikulum Merdeka Tahun Pertama*. Jakarta: Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan.
- Rusman. (2018). *Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, E. (2023). Peran Kepala Sekolah dalam Implementasi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 15(2), 45–56.
- Swarapendidikan. (2025, Mei 18). Kurikulum Merdeka: Pengertian, Tujuan, dan Cara Implementasinya di Sekolah.
- Trilling, B., & Fadel, C. (2009). *21st Century Skills: Learning for Life in Our Times*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Wenger, E. (1998). *Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Yulaelawati, E. (2020). Refleksi atas Pelaksanaan Kurikulum 2013: Pembelajaran dan Tantangannya di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 10(1), 1–12.
- Yunandra, A. (2023). Tahapan Implementasi Kurikulum Merdeka dan Refleksi Praktik Sekolah Penggerak. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 12(1), 32–47.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.